

**AKIBAT HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG TERGABUNG
SEBAGAI PEMBERONTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBERONTAKAN MELALUI AKSI
TERORISME OLEH ISIS DI JAKARTA PUSAT)**

Oleh

I Komang Yudik Kresna Putra, NIM 1714101127

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai kelompok pemberontak dalam perspektif hukum internasional dan untuk menganalisa akibat hukum bagi warga negara Indonesia yang bergabung sebagai pemberontak menurut hukum internasional serta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dan dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam pengaturan hukum internasional tentang pemberontak diatur dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 akan tetapi setiap pihak yang mengambil peran dalam konflik bersenjata termasuk pemberontak belum diakui secara subjek hukum internasional tetapi diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan hukum internasional dan (2) Akibat hukum bagi warga negara yang terlibat sebagai pemberontak dapat dilakukannya Pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang diserahkan kepada negara-negara, namun pelaksanaannya harus konsisten dengan hak-hak asasi lainnya. ICCPR Pasal 12 (4) menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dirampas haknya secara sewenang-wenang untuk memasuki negaranya sendiri.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemberontak, Hukum Internasional, ISIS

**LEGAL CONSEQUENCES FOR CITIZENS WHO JOIN AS REBELS IN AN
INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE (CASE STUDY OF REbellion
THROUGH ACTS OF TERRORISM BY ISIS IN CENTRAL JAKARTA)**

By

I Komang Yudik Kresna Putra, NIM 1714101127

Law Department

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the arrangements regarding rebel groups in the perspective of international law to analyze the legal consequences for Indonesian citizens who join as rebels according to international law as well. In this study, the type of research used is a type of normative legal research using a statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and the conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is a document study technique through library sources that are relevant to the issues discussed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate (1) that in international law arrangements regarding rebels is regulated in additional protocol II of the 1949 Geneva Convention, but every party that takes a role in armed conflict including rebels has not been recognized as a subject of international law but is required to comply with international legal rules and (2) legal consequences for citizens who are involved as rebels is still not clear enough based on limitations on human rights (HAM) are left to states, but their implementation must be consistent with other human rights. ICCPR Article 12(4) states that a person shall not be arbitrarily deprived of the right to enter their own country.

Keywords: *Legal Consequences, Rebels, International Law, ISIS*